

IMPLEMENTASI STRATEGI *ELECTRONIC GOVERNMENT* DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA CERDAS DI KOTA TANGERANG

Fitri Safira Andini, Agus Suherman, Pri Utami

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia

Author Corresponding:
Fitri Safira Andini

Abstrak.

Perkembangan teknologi yang semakin pintar membuat konsep smart tak hanya diterapkan pada berbagai perangkat, tetapi pada berbagai sistem atau tatanan. Salah satunya yang mencuat akhir-akhir ini adalah konsep smart city. Smart governance merupakan ujung tombak perencanaan smart city. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah smart governance, yang dimana smart governance berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaannya lebih efisien dan lebih baik dengan melihat implementasi strategi smart governance di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi smart governance di Kota Tangerang sudah berjalan dengan optimal dengan menggunakan teori dari Wheelen & Hunger (2004) yaitu Penetapan Program, Penetapan Anggaran, dan Penetapan Prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi e-government dalam mewujudkan tata kelola cerdas di Kota Tangerang dilihat dari ketiga indikator tersebut yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang sudah menunjukkan hasil yang baik dan dapat dikategorikan sebagai tata kelola yang cerdas, namun dalam hal penyampaian atau pengenalan program-program yang sudah dijalankan Pemkot Tangerang masih belum optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ataupun berpartisipasi terhadap program-program tersebut.

Kata Kunci : Smart Governance, E-Government, Implementasi.

PENDAHULUAN

Pemerintahan dengan tata kelola yang cerdas (*smart governance*) pada saat ini menjadi hal terpenting dalam proses peningkatan kualitas dari pemerintahan itu sendiri. Terlebih lagi semakin kritisnya masyarakat dalam menanggapi berbagai informasi yang mereka terima dan usaha-usaha mereka untuk memperoleh informasi yang transparan. *Smart governance* didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui

dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif (Pereira et al., 2018). Peran pemerintah diperlukan untuk mengintegrasikan perencanaan, peraturan, dan regulasi pembangunan desa (Susanto et al., 2016). Implementasi program pengembangan kota tidak akan berhasil tanpa adanya peran pemerintah kota, partisipasi masyarakat, serta dukungan kelompok masyarakat di lingkungan tersebut (Yuliasuti et al., 2017).

Perubahan zaman yang semakin canggih ini dalam hal perubahan menuju pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* itu tidaklah mudah karena perlu melakukan beberapa hal seperti pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, kinerja pemerintah yang berbasis elektronik, pembentukan karakteristik budaya, dan penerapan *e-government*.

Menurut Indrajit (2005), *Electronic Government* merupakan suatu usaha untuk menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (*shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, *Electronic Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif.

E-Government dapat diartikan sebagai kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Istilah *e-government* berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan hubungan antara instansi pemerintah yang satu dengan instansi pemerintah yang lainnya. Teknologi tersebut termasuk *e-mail*, *WAN (Wide Area Net- work)*, internet, peralatan *mobile computing* (Laptop, Smartphone, PDA), dan berbagai teknologi lain yang memudahkan masyarakat Kota Tangerang.

Implementasi program pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya peran pemerintah kota, partisipasi masyarakat, serta dukungan kelompok masyarakat di lingkungan tersebut. Sehingga dalam pemanfaatan akses pelayanan publik yang dikembangkan Pemkot melalui program konsep Tangerang Live, kurang berjalan secara optimal. Maka untuk mengetahui sejauh mana Penerapan Strategi *Electronic Government* Dalam Mewujudkan Tata Kelola Yang Cerdas di Kota Tangerang sehingga program tersebut dapat dikatakan sukses, akan dipaparkan

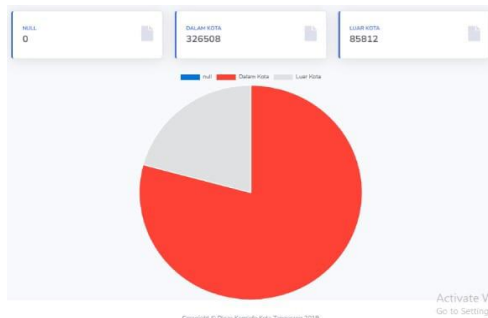
lebih lanjut dalam penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi dalam pengembangan *Smart Governance* untuk terus mendorong implementasi kebijakan yang lebih baik.

Kota Tangerang mencoba untuk mengembangkan konsep *Smart City* tersebut melalui berbagai program-program yang mulai dikembangkan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Untuk menjadikan Kota Tangerang sebagai kota yang cerdas atau *Smart City*, Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Tangerang menerapkan konsep *Smart City* dengan menyajikan dalam aplikasi berbasis digital yang diberi nama **Tangerang Live** yang merupakan akronim dari (**Liveable, Investable, Visitable, E-City**).

Tujuan dikembangkannya **LIVE Kota Tangerang** adalah untuk mewujudkan kota yang penuh dengan kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, sosial politik serta dapat menjadikan kota yang hijau dan sehat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tentunya, dengan hal tersebut harus memiliki SDM yang memadai.

Berikut merupakan data pengguna Aplikasi Tangerang Live pada tahun 2022 yang dimana pengguna mempunyai peran yang sangat sentral dalam penerapan sistem informasi. Faktor partisipasi pengguna secara umum dari berbagai riset memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan pengembangan sistem yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan keberhasilan dalam penerapan Tata Kelola Cerdas di Kota Tangerang.

**Gambar 1. Jumlah Pengguna Aplikasi Tangerang Live
Berdasarkan Lokasi Tahun 2023**



Sumber : Arsip Diskominfo Kota Tangerang

Partisipasi Masyarakat Kota Tangerang dalam membantu melaksanakan atau menjalankan program-program pemerintah belum cukup optimal, khususnya pada Program Tangerang Live. Berdasarkan data diatas, pengguna Aplikasi Tangerang Live pada tahun 2023 mencapai **412.320** pengguna.

Sedangkan total penduduk Kota Tangerang di tahun 2021 menurut kelompok umur, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dalam websitenya, mencapai angka **1.895.486** penduduk yang mana hal ini merupakan tugas besar bagi pemerintah khususnya Diskominfo Kota Tangerang untuk terus memberikan edukasi yang intens tentang pemanfaatan teknologi dan penggunaan aplikasi Tangerang LIVE.

Berikut data dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang melalui website <https://tangerangkota.bps.go.id/>

**Gambar 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Di Kota Tangerang, 2020**

Kelompok Umur Generasi <i>Generation Age Group</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)
Post Generasi Z	262 495
Generasi Z	479 480
Milenial	521 431
Generasi X	419 616
Boomer	196 011
Pre Boomer	16 453
Kota Tangerang	1 895 486

Catatan/Note:

Sumber/Source: BPS, Hasil SP2020 (September)/The result of the 2020 Population Census (September)

Sumber : BPS Kota Tangerang

Menurut Kupperschmidt (2000) (dalam Putra, 2016) Generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama

yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula.

Berdasarkan pengelompokan generasi diatas, jumlah penduduk Kota Tangerang menurut kelompok umur mencapai 1.895.486 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, 2020). Sebagai *digital natives* yang tumbuh bersamaan dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi membuat Gen Y mengenal gawai, mengakses komputer dan memiliki sosial media. Hal tersebut membentuk karakter yang kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi. Namun pada kenyatannya, angka tersebut tidak sebanding dengan pengguna Aplikasi Tangerang Live yang hanya mencapai **412.320** pengguna.

Hal ini menunjukkan bahwasannya terjadi GAP atau ketimpangan yang terjadi di Kota Tangerang. Yang mana Kota Tangerang merupakan kota yang strategis, kota penghubung dengan Ibu Kota dan terhubung di regional Jabodetabek.

Implementasi program pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya peran dari pemerintah kota, partisipasi masyarakat, serta dukungan kelompok masyarakat di lingkungan tersebut. Sehingga dalam pemanfaatan akses pelayanan publik yang dikembangkan Pemkot melalui program konsep Tangerang Live, kurang berjalan secara optimal.

Sehingga berdasarkan asumsi tersebut maka perlu adanya penelitian sejauh mana Implementasi Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Dalam Mewujudkan Tata Kelola Yang Cerdas (*Smart Governance*) di Kota Tangerang. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Strategi Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dalam mengimplementasikan Program serta Kebijakan Pemerintah sehingga terwujudnya Tata Kelola Yang Cerdas (*Smart Governance*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan observasi. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang, peneliti akan

menggunakan wawancara mendalam. Peneliti menggunakan metode ini agar memberikan ruang bicara yang luas kepada para narasumber dalam memberikan jawaban, sesuai dengan *frame of reference* mereka. Karakteristik dari kualitatif deskriptif sendiri adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar dan bukan angka seperti penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dapat memperlihatkan pengalaman individu menghadapi peran pemerintah serta partisipasi dari masyarakat itu sendiri dan mempelajari tentang kelompok serta pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya peneliti sebagai pengumpul data akan turun langsung ke lapangan untuk pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Strategi *Electronic Government* Dalam Mewujudkan Tata Kelola Cerdas Kota Tangerang

Dalam konteks implementasi, Kota Tangerang memiliki pengaturan aspek teknis yang bertujuan agar mekanisme pertukaran data mencapai tingkat interoperabilitas yang tinggi, sehingga transfer data dari sumber ke tujuan dapat dilakukan tanpa mempedulikan heterogenitas platform perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Berkaitan dengan kebijakan berbasis IT yang sekarang, sudah digariskan atau di amanatkan melalui Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Hasil dari masterplan TIK, karena berbasis dengan rencana induk tersebut yang dihasilkan saat ini, Diskominfo Kota Tangerang membangun banyak aplikasi yang berbasis layanan publik manajemen pemerintahan. Kemudian aplikasi yang banyak itu, dijadikan dalam satu dashboard 2 *super apps* besar yaitu **Tangerang Live dan Portal E-Gov** supaya mempermudah masyarakat karena masyarakat saat ini kebanyakan cenderung menggunakan mobile. Dan untuk

aplikasi layanan publik, Diskominfo Kota Tangerang menggunakan *single sign on (SSO)* yang berbasis NIK.

Mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025.

Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah bertahap, konkret, realistis, serta sungguh-sungguh. Road Map Birokrasi sendiri merupakan Rencana Kerja Rinci dan Berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berikut Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Tangerang selama 5 tahun hingga tahun 2025 mendatang berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2021, diantaranya sebagai berikut :

A. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

- 1) Implementasi *Masterplane-Government/SPBE* :
 - a) Penyiapan Infrastruktur Dasar (*Hardware*)
 - b) Penyiapan Infrastruktur Dasar (*Software*)
- 2) Penyiapan Regulasi dan Kelembagaan
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM pada Perangkat Daerah
- 4) Pemantauan dan Evaluasi
- 5) Tindak lanjut Hasil Evaluasi

B. Pengembangan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Pelayanan Publik

- 1) Penguatan Teknologi Informasi dalam Memberikan Pelayanan
- 2) Peninjauan dan Perbaikan Berkelanjutan

C. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

- 1) Penguatan Kapasitas PPID
- 2) Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kota Tangerang yang semakin prima bagi masyarakat serta tengah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta keandalan pelayanan publik yang berkualitas. Hal itu sejalan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan tersebut, diperlukan sinergi antar berbagai instansi pemerintah dari beberapa kementerian dan badan pemerintah, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Penerapan SPBE ini berkaitan erat dengan konsep **smart governance** yang merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Dengan kata lain, SPBE merupakan katalis bagi terwujudnya tata kelola cerdas.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) diharapkan dapat menjalankan perannya dalam melakukan harmonisasi pada ekosistem digital itu agar tidak terjadi duplikasi pembangunan, baik infrastruktur, peraturan, maupun SDM-nya.

Berikut beberapa usaha serta strategi yang dilakukan Pemerintah Kota dalam mewujudkan Tata Kelola Cerdas di Kota Tangerang, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Strategi utama yaitu infrastruktur cerdas yang merupakan infrastruktur berbasis teknologi digital untuk menangkap data dan pengetahuan dari masyarakat dan lingkungan.
- 2) Kedua, perancangan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan proses tata kelola organisasinya.
- 3) Yang ketiga, strategi penguatan kompetensi sumberdaya manusia.
- 4) Lalu strategi dalam penguatan kebijakan cerdas yang memiliki beberapa strategi kunci, diantaranya reformasi regulasi secara terbuka yang mempermudah untuk berinvestasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah.
- 5) Selanjutnya peningkatan kolaborasi sebagai wujud sinergitas pemerintahan cerdas.
- 6) Diskominfo Kota Tangerang juga telah bekerja sama dengan beberapa lembaga luar negeri *NGO (Non-Governmental Organization)* yakni

- diantaranya *USAID (United States Agency for International Development)* dan *SOC (Security Operations Center)* dari *Swiss German University (SGU)*.
- 7) Terdapat *political will* yang bagus dari pimpinan tertinggi terkait anggaran yang dibutuhkan.
 - 8) SDM internal yang relatif mumpuni (tenaga ahli jaringan di Diskominfo Kota Tangerang tanpa melibatkan vendor dari pihak ketiga).

Kerjasama yang dilakukan Pemkot Tangerang dengan lembaga-lembaga luar negeri tersebut sangat mempermudah Pemerintah Kota, baik dari sisi efisiensi biaya karena tidak mengeluarkan biaya kemudian hasil yang dimunculkan dari evaluasi tersebut otomatis di biayai dari lembaga-lembaga tersebut dan hasil evaluasinya bisa dipakai untuk peningkatan kualitas di sektor-sektor yang mereka bantu.

Kemudian juga manfaatnya sangat banyak untuk Diskominfo Kota Tangerang, karena hasil dari kerjasama tersebut sangat berguna untuk pemenuhan bukti dukung penilaian yang di keluarkan oleh pusat seperti penilaian SPBE. Dengan pelaksanaan itu menjadi salah satu bantuan untuk pemenuhan indikator-indikator penilaian, baik itu SPBE ataupun *smart city*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang diharapkan dapat terus terdorong untuk menginisiasi berbagai kolaborasi yang dapat melahirkan inovasi-inovasi baru untuk membantu mempercepat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) guna mewujudkan tata kelola cerdas di Kota Tangerang.

Penetapan Program dalam Penerapan *Smart Governance* Kota Tangerang

Menurut (*Hunger and Wheelen, 2003:17*), Program merupakan pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan atau awal dari suatu usaha penelitian baru. Program dibuat sebagai tindakan atas strategi.

Pemerintah Kota Tangerang gencar menjalankan berbagai program unggulannya untuk memulihkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang. Hal ini di dorong oleh situasi pandemi yang semakin terkendali dan meningkatnya pergerakan aktivitas masyarakat. Sejumlah program unggulan Pemkot Tangerang diantaranya ada pada sektor Pendidikan, ekonomi, UMKM, dan pelayanan publik.

Gambar 3 Program-Program Pemerintah Kota Tangerang



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

Dengan hadirnya program-program pemerintah yang ditujukan untuk pemulihan dan penguatan UMKM, diharapkan stabilitas ekonomi di daerah, khususnya di Kota Tangerang ini dapat tercapai. Di sisi lain, terdapat berbagai program dan inovasi yang telah dijalankan Pemkot Tangerang di bidang tata kelola pelayanan publik. Hal ini sebagai upaya membangun Tangerang *Smart City* melalui aplikasi dan layanan berbasis digital. Kota Tangerang pun berhasil menjadi salah satu kota terbaik diantara 100 kota lainnya di Indonesia dari Kemenkominfo RI.

Tentunya hal tersebut membuat masyarakat Kota Tangerang untuk selalu beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga perlu dilakukan

inovasi serta sosialisasi terkait digitalisasi agar mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi.

Selain itu, Pemkot Tangerang menerima anugerah sebagai Badan Publik Informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tahun 2022.

Capaian tersebut mencerminkan komitmen Pemkot Tangerang untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini terutama mengenai keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik, serta kemudahan masyarakat Kota Tangerang dalam melakukan kegiatan di berbagai bidang lewat digitalisasi yang telah di kembangkan Pemkot Tangerang, seperti Tangerang Live.

Pemerintah Kota Tangerang hanya perlu sedikit lebih gencar mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait aplikasi Tangerang Live, mengingat banyak sekali manfaat yang diperoleh lewat aplikasi tersebut untuk memudahkan masyarakat serta akan membantu mewujudkan tata kelola cerdas di Kota Tangerang.

Berdasarkan data dan informasi diatas, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan berbagai upaya serta strategi dalam mewujudkan Tata Kelola Yang Cerdas (*Smart Governance*) di Kota Tangerang melalui berbagai Program yang di inisiasi oleh Pemkot terutama dalam hal pelayanan publik yang sampai saat ini sudah terlihat banyak manfaatnya untuk masyarakat Kota Tangerang dan rencana-rencana strategi (Renstra) yang sudah dirancang untuk beberapa tahun kedepan yang akan menjadi acuan Pemerintah Kota Tangerang untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanannya bagi masyarakat serta semakin baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Penetapan Anggaran dalam Penerapan *Smart Governance* Kota Tangerang

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan (*Hunger and Wheelen, 2003:18*). Anggaran tidak hanya memberikan perencanaan strategi baru dalam tindakan, tetapi juga menentukan dengan laporan keuangan yang menunjukan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan perusahaan. Jadi dalam anggaran digunakan perencanaan dan kontrol anggaran, agar biaya yang dibutuhkan dalam setiap program dapat diketahui.

Pemerintah Kota Tangerang menetapkan lima rencana prioritas untuk menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Sedangkan untuk R-APBD Kota Tangerang 2023 sudah ditetapkan Rp 5,1 Triliun.

Adapun lima program prioritas tersebut seperti pemantapan perekonomian daerah sehingga dana APBD 2023 akan digunakan untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat pasca covid-19. Jadi, Pemerintah Kota Tangerang akan kembali menggelar berbagai kegiatan seperti bazar dan pasar murah agar masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah masih bisa berbelanja memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Rencana prioritas yang akan memanfaatkan dana APBD Kota Tangerang tahun 2023 yaitu pemanfaatan kualitas SDM. Hal itu akan dilakukan dengan program peningkatan layanan kesehatan seperti *Universal Health Coverage (UHC)*. Lalu kemitraan pemberdayaan masyarakat di Forum Kota Tangerang Sehat (FKTS) dan posyandu. Serta meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan beasiswa siswa miskin dan dana BOP operasional penyelenggaraan pendidikan satuan PAUD.

Selain itu, Pemkot Tangerang juga akan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah. Seperti menyempurnakan dan melengkapi infrastruktur drainase, pengendalian banjir, menjaga kondisi infrastruktur jalan kota, jalan lingkungan, serta pengembangan jaringan air minum, lalu peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat Kota Tangerang yaitu penyediaan sarana dan prasarana serta penanganan sampah.

Sementara rencana prioritas alokasi APBD 2023 Kota Tangerang terakhir adalah peningkatan layanan publik. Anggaran APBD akan digunakan untuk mendukung pelayanan publik oleh aparatur yang berkompeten sehingga masyarakat bisa menikmati kemudahan akses pelayanan publik melalui portal aplikasi Tangerang Live dan lain-lain.

Penetapan Prosedur dalam Penerapan *Smart Governance* Kota Tangerang

Prosedur atau sering disebut dengan *Standard Operating Procedures (SOP)* adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan dan menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan (*Hunger and Wheelen, 2003:18*). Prosedur secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program yang ada.

Pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien dan efektif. Melalui pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* menjelaskan bahwa *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berlandaskan teknologi informasi merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas layanan informasi yang cepat dan tepat. Integrasi sistem aplikasi merupakan kesatuan dari berbagai aplikasi layanan di dalam pemerintahan guna memudahkan pemindahan data antara beberapa instansi pemerintahan sebagai wujud layanan *e-government* kepada masyarakat.

E-government telah menjadi jawaban dari pemerintah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi. Tuntutan dari masyarakat akan sistem pemerintahan yang bersih dan pelayanan yang efektif dan efisien serta berkualitas, telah mendorong kita untuk terus memaksimalkan *e-government*. Beberapa regulasi yang sudah di atur oleh pemerintah pusat mengacu pada arsitektur nasional nomor 132 perpres tahun 2022 tentang arsitektur SPBE nasional. Di tahun 2023 ini Diskominfo Kota Tangerang telah membuat arsitektur SPBE Kota Tangerang.

Sehingga prosedur atau langkah-langkah Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan Tata Kelola Cerdas ialah yang pertama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), dimana hal tersebut yang menjadi acuan dalam menetapkan program-program yang memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permintaan dari beberapa dinas terkait sehingga tercipta lah beberapa program serta aplikasi yang memudahkan masyarakat serta

meningkatkan kinerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota, khususnya Diskominfo Kota Tangerang.

KESIMPULAN

Pemerintahan dengan tata kelola yang cerdas (*smart governance*) pada saat ini menjadi hal terpenting dalam proses peningkatan kualitas dari pemerintahan itu sendiri. Terlebih lagi semakin kritisnya masyarakat dalam menanggapi berbagai informasi yang mereka terima dan usaha-usaha mereka untuk memperoleh informasi yang transparan.

Hasil dari masterplan TIK, karena berbasis dengan rencana induk tersebut yang dihasilkan saat ini adalah Diskominfo Kota Tangerang bisa membangun banyak aplikasi yang berbasis layanan publik manajemen pemerintahan. Kemudian aplikasi yang banyak tersebut, dijadikan dalam satu dashboard 2 *super apps* besar yaitu **Tangerang Live dan Portal E-Gov** supaya mempermudah masyarakat karena masyarakat saat ini kebanyakan cenderung menggunakan mobile. Dan untuk aplikasi layanan publik, Diskominfo Kota Tangerang menggunakan *single sign on (SSO)* yang berbasis NIK.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi strategi *e-government* menurut *Wheelen & Hunger* yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya dari ketiga indikator tersebut Pemkot Tangerang telah memberikan *impact* (manfaat) serta sudah menunjukkan hasil yang baik dan dapat dikategorikan sebagai tata kelola yang cerdas, namun dalam hal penyampaian atau pengenalan program-program yang sudah dijalankan Pemkot Tangerang masih belum optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ataupun berpartisipasi terhadap program-program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- E-government, T. P., & Daerah, D. I. P. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Pelaksanaan E-Government Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, (3), 185–204.
- Penerapan, & E-Government. (2006). Analisis Penerapan E- Government Dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapantan Provinsi Riau Di

- Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan. *Motivation and Emotion*, 30(3), 243–250.
- Rizqi, M. N. A., Fitrayadi, D. S., & Nida, Q. (2022). Implementasi Layanan Pendidikan pada Aplikasi Tangerang Live dalam Menunjang Pelayanan Pendidikan di Kota Tangerang. *Journal of Civic Education*, 5(3), 411–418.
- Kurnaedi, D., Informasi, S., Pgri, S., Perintis, T. J., Ii, K., & Banten, T. (2017). Penerapan “Live” Smart City Kota Tangerang. *Technology Acceptance Model*, 8(1), 18–28.
- Faidat, N., & Khozin, M. (2018). Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City): Studi Kasus Kota Yogyakarta. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(2), 171–180.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1–16.
- Abdul Basit, & Adie Dwiyanto Nurlukman. (2021). Branding Kota Pinta Pada Teknologi Komunikasi Tangerang Live. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1429–1439.
- Kusumandari, E., Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., Nugroho, A. A., Enceng, Hidayat, A., Ardiansyah, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Studi perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018). *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 3(2), 87–96.
- Subagia, D., Supriadi, Y. N., & Hermawanto, A. R. (2020). Model Strategi City Branding, Electronic Word of Mouth, Terhadap Keputusan Berkunjung Yang Dimediasi Oleh City Image Dalam *Jurnal MoZaiK*, 12, 33–50.
- Darmawan, N. Muhammad, R L. Erika R. Surya, H P. Syifa, S. Jamaludin. Edy, S N. Janner, S. (2020). E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi. Web: kitamenulis.id.